

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, memiliki sistem politik yang dibangun di atas prinsip-prinsip demokrasi yang kuat dan terintegrasi. Salah satu manifestasi paling nyata dari demokrasi ini adalah melalui proses pemilihan umum (Pemilu) yang rutin diselenggarakan setiap lima tahun sekali¹. Pemilu merupakan mekanisme utama bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil mereka di berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari legislatif hingga eksekutif. Proses ini memastikan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat². Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD”.

Sealant demean seminar democracy yang menjunjung tinggi partisipasi dan kedaulatan rakyat. Dalam konteks Pemilu, indonesia pertama kali menyelenggarakan Pemilu pada tahun 1955 dengan memilih partai politik³. Partai politik memainkan peran krusial sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Partai politik adalah organisasi yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat dan selain itu, partai politik juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat,

¹ Kasih, E. *Pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem politik di Indonesia guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Jurnal Lemhannas RI, Vol. 6, No.2, 2018. Hlm, 51.

² Santoso, T., & Budhiati, I. *Pemilu di Indonesia: kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2021, Hlm. 22.

³ Husein, H. *Pemilu Indonesia*. Jakarta: Perludem. 2014. Hlm. 18.

memobilisasi dukungan politik, serta sebagai wadah untuk kaderisasi dan rekrutmen pemimpin-pemimpin politik⁴.

Dengan kata lain, partai politik adalah pilar penting dalam sistem demokrasi yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa pemerintah tetap akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dengan sistem demokrasi yang membuka kesempatan bagi rakyatnya untuk berkumpul berserikat dan menyatakan pendapat yang sesuai pada UUD 1945 Pasal 28 ayat 3. Maka di Indonesia menerapkan sistem multi-partai, Indonesia memiliki banyak partai politik yang mewakili spektrum luas ideologi dan kepentingan.

Jumlah partai yang banyak ini menciptakan kompetisi yang ketat, di mana setiap partai harus mampu menarik perhatian dan dukungan rakyat melalui program-program dan visi misi yang relevan dan menjawab kebutuhan masyarakat⁵. Dengan menganut system multi partai tentu menimbulkan suatu persaingan yang intens, partai-partai harus terus beradaptasi dan berinovasi untuk tetap relevan dan mendapatkan kepercayaan dari pemilih. Hal ini menuntut partai untuk memiliki manajemen strategis yang efektif, kemampuan komunikasi politik yang kuat, serta pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial dan politik di tingkat lokal maupun nasional.

Persaingan ini tentunya agar dapat menjadi partai terbaik dan terpilih mewakili aspirasi rakyat yang diwakili. Meski tidak ada larangan untuk

⁴ Labolo, M., dkk. *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015. Hlm. 43.

⁵ Oga, O. H. G. Analisis Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pamerintahan Presidensial Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol.1, No.1, 2021, Hlm. 28.

mendirikan partai politik di Indonesia selagi masih tetap mengikuti aturan pendirian partai yang sesuai pada UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Setelah terbentuk dan dinyatakan berdiri dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia partai tersebut tidak serta merta dapat langsung menjadi partai yang dapat mengikuti kontestasi Pemilu. Sebab masih ada aturan verifikasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), setelah dinyatakan lulus barulah Parpol tersebut dapat mengikuti Pemilu⁶.

Tabel. 1.1
Partai Peserta Pemilu Tahun 2024 Dan Perolehan Suara

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Persentase
1	PDI-P	25.387.279	16,72%
2	Golkar	23.208.654	15,29%
3	Gerindra	20.071.708	13,22%
4	PKB	16.115.655	10,62%
5	NasDem	14.660.516	9,66%
6	PKS	12.781.353	8,42%
7	Demokrat	11.283.160	7,43%
8	PAN	10.984.003	7,24%
Partai Gagal Lolos Ambang Batas 4%			
9	PPP	5.878.777	3,87%
10	PSI	4.260.169	2,81%
11	Perindo	1.955.154	1,29%
12	Gelora	1.281.991	0,84%
13	Hanura	1.094.588	0,72%
14	Buruh	972.910	0,64%
15	Ummat	642.545	0,42%
16	PBB	484.486	0,32%
17	Garuda	406.883	0,27%
18	PKN	326.800	0,22%

Sumber : KPU RI, 2024

Berdasarkan data di atas, meski telah berhasil menembus persyaratan KPU untuk dapat mengikuti Pemilu, Para partai politik juga harus mampu

⁶ setkab.go.id. *Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024*. Dakses melalui <https://setkab.go.id/pendaftaran-verifikasi-dan-penetapan-partai-politik-peserta-pemilu-serentak-tahun-2024/>. Pada 08 Juli 2024, Pukul 16.00 WIB.

melewati sebuah ambang batas parlemen, atau aturan suara minum yang dapat dinyatakan dan memiliki wakilnya untuk duduk di kursi legislatif. Sebagaimana dalam aturan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”⁷.

Pada penjelasan data diatas penulis memfokuskan pada salah satu partai yang dianggap lama dalam pembentukannya namun partai tersebut gagal dalam melewati ambang batas parlemen, partai tersebut adalah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dibentuk pada 14 November 2006. Dan berhasil mengikuti Pemilu pertama kali pada tahun 2009. Hanura di bentuk oleh para pertemuan purnawirawan TNI dan Polri diantaranya tokoh penginisiasi berdirinya Hanura adalah Jendral Purnawirawan Wiranto, mantan panglima ABRI. Berikut perjalanan perolehan suara Hanura dalam setiap Pemilu hingga akhirnya menerima kegagalan dalam bertahan dalam persaingan nasional.

Tabel. 1.2
Perolehan Suara Partai Hanura Dalam Pemilu DPR-RI

Pemilu	Perolehan Suara	Perolehan Kursi	Persentase
2009	3.922.870	18 Kursi	3,8 %
2014	6.576.498	16 Kursi	5,26 %
2019	2.161.507	-	1,54 %
2024	1.094.588	-	0,72 %

Sumber : Data Olahan Penulis, KPU RI, 2024.

⁷ mkri.id. *Aturan Ambang Batas Parlemen Empat Persen Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029 dan Pemilu Berikutnya*. Diakses melalui <https://www.mkri.id/index.php?> Pada 08 Juli 2024, 17.32 WIB.

Kegagalan yang diperoleh Hanura sejak Pemilu tahun 2019, tentu tidak terlepas dari adanya konflik internal dan juga kurangnya, sebuah inovasi yang diciptakan dalam program tubuh partai sehingga Hanura tertinggal jauh dari partai-partai politik yang sama pembentukanya setelah adanya Pemilu langsung dengan system proposional terbuka di pemilu 2009 seperti partai yang seumur dengan Hanura yang masih eksis hingga saat ini seperti Gerindra, Demokrat dan 5 tahun kemudian disusul Nasdem. Kegagalan di tingkat pusat juga mempengaruhi di akar rumput.

Oleh sebab itu peneliti melakukan fokus pada dalam konteks persaingan yang ketat ini, fenomena yang dialami juga oleh Partai Hanura di Provinsi Jambi menarik untuk dianalisis. Selama tiga periode Pemilu terakhir, Partai Hanura mengalami penurunan signifikan dalam perolehan suara, hingga akhirnya gagal memperoleh kursi di DPRD Provinsi Jambi pada Pemilu 2024. Fenomena ini menunjukkan bahwa ada masalah mendasar dalam strategi dan manajemen partai yang perlu dievaluasi. Penurunan dukungan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan preferensi pemilih, kegagalan dalam komunikasi politik, atau kurangnya inovasi dalam program-program partai.

Tabel. 1.3
Perolehan Kursi Partai Hanura Pada DPRD Provinsi Jambi

Pemilu	Perolehan Suara	Perolehan Kursi	Persentase
2009	82.513	5 Kursi	7,83%
2014	85.439	3 Kursi	5,05%
2019	55.517	2 Kursi	2,62%
2024	7.923	0 Kursi	0, 78%

Sumber : Data Olahan Penulis, KPU Provinsi Jambi, 2024.

Berdasarkan data tabel di atas, pada Pemilu 2019 terdapat dua Caleg yang terpilih di antaranya, atas nama Izhar Majid dari Dapil 3 Sarolangun-Merangin dengan jumlah perolehan suara 13.242 suara dan atas nama H. Kamal dari Dapil 5 Bungo-Tebo dengan perolehan suara sebanyak 8.199 suara. Untuk Pemilu 2024 lalu secara komposisi Partai Hanura Provinsi Jambi dapat dikatakan tidak ideal dalam pengisian persyaratan. Terdapat dua dapil yang tidak terisi oleh Caleg Partai Hanura yakni pada Daerah Pemilihan (Dapil) 2 dan 4. Ini menandakan tidak efektifnya mesin kaderisasi dan rekrutmen dalam tubuh internal karena adanya manajemen yang tidak begitu baik. Berikut data mengenai DCT Partai Hanura pada Pileg DPRD Provinsi Jambi beserta perolehan suara sebagai mana yang tertera dalam data tabel berikut:

Tabel. 1.4
Daftar Calon Legislatif Tetap Partai Hanura Pada Pileg DPRD
Provinsi Jambi Tahun 2024

No	Nama Caleg	Perolehan Suara
<i>Dapil 1 (Kota Jambi)</i>		
1	Deslina Fitri	232
2	Ridho Sandiko	103
3	M. Yani	68
<i>Dapil 2 (Muaro Jambi – Batang Hari)</i>		
	-	
<i>Dapil 3 (Sarolangun - Merangin)</i>		
1	Rukiya Alfa Robi	1.832
2	Riki Parmiko Jaya	176
3	Hariyani	113
<i>Dapil 4 (Kerinci – Sungai Penuh)</i>		
	-	
<i>Dapil 5 (Bungo - Tebo)</i>		
1	Novia Sintia	533
2	Putri Liana Sari	244
<i>Dapil 6 (Tanjung Jabung Barat – Tanjung Jabung Timur)</i>		
1	M. Rosyadi Ali	291
2	P. Budi Hartono	555
3	Ani Nuraini	67

4	Ade Saputra	72
5	Nyimas Cik Ana	37

Sumber: KPU Provinsi Jambi, 2024

Dari pemaparan tabel 1.4, dapat dilihat jika terdapat 2 Dapil yang kosong tidak ada caleg yang mengisi, kemudian dalam perolehan suara juga hanya satu caleg yang mampu memperoleh seribu lebih suara, selebihnya hanya dapat mengumpulkan di bawah angka 500 suara. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan penurunan dukungan terhadap Partai Hanura, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan dan dukungan dari pemilih. Evaluasi ini penting agar Partai Hanura dapat kembali bersaing secara efektif dalam kancah politik di Provinsi Jambi dan secara keseluruhan di Indonesia. Agar penelitian ini menjadi lebih terarah dan bersipat pengembangan dari penelitian terdahulu, peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Arizal Saputra dan Ubaidillah, dengan judul penelitian “Analisis Kegagalan Marketing Politik Partai NasDem Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Aceh”⁸. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi marketing politik yang diterapkan oleh Partai NasDem serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan partai tersebut mengalami penurunan perolehan kursi pada Pemilu Legislatif tahun 2019 di Aceh. Dengan hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan Partai NasDem belum menerapkan marketing politik secara optimal, sehingga

⁸ Saputra, A., dkk. *Analisis Kegagalan Marketing Politik Partai NasDem Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Vol.6, No.2. 2021.

mengalami penurunan perolehan kursi pada Pemilu Legislatif 2019. Penurunan ini disebabkan oleh faktor internal, yakni kesalahan partai sendiri dimana kader yang kurang berkompeten, dan tidak fokus dalam tugas mereka untuk menempatkan pesan politik kepada masyarakat menjadi penyebab buruknya kinerja Partai NasDem pada Pemilu legislatif DPRA 2019, dan faktor eksternal terhadap pola kampanye dan adanya kampanye hitam dari pihak lawan Partai NasDem. Perbedaan dalam penelitian pada penelitian terdahulu pertama ini berada pada penggunaan teori untuk menganalisis fenomena, dimana penelitian tersebut menggunakan teori marketing politik sedangkan penelitian ini menggunakan manajemen partai politik.

Kedua penelitian yang dilakukan s oleh H. Romario. S, dengan judul “Faktor Penyebab Kegagalan Partai Golongan Karya Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 (Studi : Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara)”⁹. Tujuan penelitian ini adalah terkait kegagalan Partai Golongan Karya dalam pemilu legislatif tahun 2014. Dimana Partai Golkar gagal menuju DPRD Kabupaten Labuhanbatu. Dengan hasil penelitian Penyebab kegagalan Partai Golkar dalam Pemilu Legislatif 2014 yang paling berpengaruh adalah salah strategi penempatan caleg yang tidak sesuai, sehingga menyebabkan penurunan suara di beberapa daerah pemilihan. Perbedaan penelitian yang sedang ditulis oleh penulis dengan penelitian terdahulu ini adalah pada temuan, jika penelitian terdahulu ini gagal dikarenakan kesalahan pada penempatan caleg yang tidak sesuai maka penelitian ini membahas mengenai manajem partai secara keseluruhan.

⁹ Romario, H. *Faktor Penyebab Kegagalan Partai Golongan Karya Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 (Studi: Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara)*. (Bachlor Thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). 2015. Hlm. xiv

Ketiga, penelitian terdahulu ini ditulis oleh Rudi Salam Sinaga dengan judul “Demokratisasi Kelembagaan Partai Politik Di Indonesia Melalui Manajemen Partai Politik Modern: Tinjauan Teoritis Dan Regulasi”¹⁰. Tujuan penelitian untuk memahami konsep manajemen partai politik modern secara teoritis dan meninjau apakah indikator-indikator tersebut tersedia dalam regulasi yang mengatur partai politik di Indonesia. Dengan hasil penelitian Hasil dari studi ini mendapatkan indikator-indikator dari konsep manajemen partai politik modern Hofmeister dan Grabow (2011) telah sejalan dengan prinsip-prinsip yang termuat di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Perbedaan dengan penelitian terdahulu ketiga ini pada penggunaan teori, dimana pengukuran indikator ini dilakukan terhadap satu partai saja karena kekalahan dan kegagalan maka peneliti ingin melihat dari sudut pandang manajemen partai. Sedangkan penelitian ketiga menggunakan konsep manajemen partai kepada seluruh partai di Indonesia dengan mengaitkannya terhadap aturan yang berlaku.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Alfirah Syukur, dengan judul penelitian “Manajemen Partai Politik (Studi Pada Organisasi Garuda Keadilan Terhadap Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Di Kota Makassar)”¹¹. Dengan tujuan penelitian Pengetahuan mendalam tentang peran organisasi Garuda Keadilan sebagai salah satu sayap

¹⁰ Sinaga, R. S. *Demokratisasi Kelembagaan Partai Politik Di Indonesia Melalui Manajemen Partai Politik Modern: Tinjauan Teoritis Dan Regulasi*. Governance : Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, Vol.4. No.4, 2018. Hlm.12.

¹¹ Syukur, A. *Manajemen Partai Politik (Studi Pada Organisasi Garuda Keadilan Terhadap Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Di Kota Makassar)*. (Bachelor Political Science Thesis, Universitas Hasanuddin). 2024. Hlm. x.

Partai Keadilan Sejahtera dalam proses perekrutan calon anggota legislatif di Kota Makassar menjelang Pemilu 2024. Pada hasil penelitian menunjukkan Garuda Keadilan berperan dalam proses rekrutmen melalui tahapan sertifikasi dengan menyediakan pendidikan politik bagi calon anggota legislatif. Perbedaan terhadap penelitian ini adalah pada fokus penelitian, penelitian yang ditulis Alfirah Syukur membahas mengenai bagaimana organisasi sayap partai dalam melakukan proses kaderisasi dalam partai politik melalui rekrutmen. Sedangkan penelitian ini ingin melihat kegagalan parpol dari sudut manajemen partainya terlebih dahulu.

Berangkat dari beberapa penelitian terdahulu di atas. Melalui Penelitian ini, penulis dapat mengungkapkan sudut pandang baru bagaimana manajemen partai politik harus siap dalam mempersiapkan segala aspek terkait kemajuan partai, termasuk strategi komunikasi melalui Program Partai, mobilisasi sumber daya, dan pengembangan kaderisasi. Sebagaimana fenomena yang terjadi pada Partai Hanura pada Pileg DPRD Provinsi Jambi, Penurunan dukungan terhadap Partai Hanura di Provinsi Jambi dapat menjadi cermin bagi partai politik lain untuk mengkaji ulang pendekatan dalam manajemen strategis, termasuk bagaimana mengembangkan program-program yang sesuai. Untuk itulah peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul, **“Kegagalan Partai Hati Nurani Rakyat Pada Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024 Dalam Perspektif Manajemen Partai Politik”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dengan berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas sebagai berikut:

- a. Apa saja yang menjadi penyebab kegagalan Partai Hanura dalam Pileg DPRD Provinsi Jambi tahun 2024?
- b. Bagaimana Manajemen Partai Politik pada Dewan Pimpinan Daerah Hanura Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Diharapkan melalui penelitian ini, penulis dapat mengungkapkan jawaban dari rumusan masalah sebagai mana dijelaskan di atas, sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan memahami Apa saja yang menjadi penyebab kegagalan Partai Hanura dalam Pileg DPRD Provinsi Jambi tahun 2024.
- b. Mengetahui Bagaimana manajemen Partai Politik pada Dewan Pimpinan Daerah Hanura Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis mengharapkan, penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan secara :

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat dalam memperkaya literatur tentang manajemen strategis partai politik dan perilaku pemilih di Indonesia. Penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai

bagaimana partai politik dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, serta pentingnya strategi komunikasi yang efektif dalam mempengaruhi preferensi pemilih.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi konkret bagi partai politik, khususnya dalam hal pengembangan program yang relevan, penguatan struktur organisasi, dan pemanfaatan teknologi dalam kampanye politik. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Partai Hanura dan partai politik lainnya untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas mereka, memastikan keberlanjutan dan kesuksesan dalam kompetisi politik yang ketat di masa mendatang.

1.5 Landasan Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan landasan teori sebagai pisau analisis dalam menjelaskan dan mengukur fenomena yang sedang terjadi, berikut landasan teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1.5.1 Partai Politik

Keberadaan partai politik merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan hak asasi manusia dalam hal berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat. Selain itu, partai politik juga mendukung kelancaran demokrasi di suatu negara. Demokrasi yang efektif dicapai melalui keberadaan partai politik modern yang terorganisir, pelaksanaan pemilihan umum secara berkala, dan aktivitas kelompok-kelompok penekan. Dengan demikian, demokrasi berfungsi sebagai suatu

mekanisme atau "pengaturan institusional untuk mencapai keputusan politik melalui persaingan kompetitif untuk memperoleh suara rakyat"¹².

Berdasarkan sejarah dan perkembangan, partai politik pertama kali muncul di negara-negara Eropa Barat. Seiring dengan berkembangnya pandangan bahwa rakyat harus diperhitungkan dan dilibatkan dalam proses politik, partai politik muncul secara spontan¹³. Pada awal kemunculannya, partai politik berpusat pada kelompok-kelompok politik elit dan aristokrat di parlemen. Namun, seiring waktu, aktivitas partai politik juga meluas di luar parlemen. Partai-partai dari kalangan masyarakat umum mulai bermunculan dan berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah dan rakyat, yang umumnya berkembang secara spontan¹⁴.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa, partai politik adalah sebuah badan hukum publik yang diakui oleh pemerintah, terdiri dari sekelompok individu yang terorganisir dengan baik¹⁵. Tujuannya adalah untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan secara damai melalui pemilihan umum (pemilu) yang diadakan secara berkala. Dalam penjelasan lain partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kendali atas pemerintahan untuk pimpinan partainya. Berdasarkan kendali ini, partai memberikan manfaat ideologis dan

¹² Lutfi, M & Satriawan, M.I, *Risalah Hukum Dan Teori Partai Politik*. Malang: UB Press, 2015. Hlm. 19.

¹³ Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2012. Hlm.398

¹⁴ *Op.Cit*, Lutfi, M & Satriawan, M.I. Hlm. 19.

¹⁵ M.Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik*, Jakarta: Rajawali Press, 2011. Hlm.7

materiil kepada anggotanya¹⁶. Miriam Budiardjo mendefinisikan partai politik sebagai kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan menduduki posisi politik (biasanya) melalui cara konstitusional¹⁷.

Berdasarkan definisi tentang partai politik tersebut, ciri-ciri partai politik adalah sebagai berikut¹⁸:

- 1) Melaksanakan kegiatan secara berkelanjutan.
- 2) Berupaya memperoleh atau merebut serta mempertahankan kekuasaan dan pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 3) Berpartisipasi dalam pemilu.
- 4) Dapat bersifat lokal maupun nasional dan berakar dari masyarakat.

Selain itu partai politik memiliki sebuah fungsi dalam pembentukan dan kehadirannya, yang diatur dalam Pasal 11 UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No 2 Tahun 2011 tentang partai politik, yaitu¹⁹:

- 1) Sarana Komunikasi Politik
- 2) Sarana Sosialisasi Politik
- 3) Sarana Rekrutmen Politik
- 4) Sarana Pengatur Konflik
- 5) Pembuat Kebijakan.

¹⁶ Efriza, *Political Explore*. Bandung: Alfabeta, 2012, Hlm.214

¹⁷ *Loc.Cit*, Budiardjo, Miriam. Hlm. 5

¹⁸ *Loc.Cit*, Lutfi, M & Satriawan, M.I. Hlm. 24.

¹⁹ *Loc.Cit*, Lutfi, M & Satriawan, M.I. Hlm. 38.

Partai politik juga memiliki tujuan yang juga diatur dalam dalam Pasal 11 UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No 2 Tahun 2011 tentang partai politik, sebagai berikut²⁰ :

1) Tujuan Partai Politik

- a. Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945.
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan NKRI.
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia

2) Tujuan Khusus Partai Politik

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
- b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tipologi partai politik merujuk pada pengelompokan partai-partai berdasarkan karakteristik khusus yang dimilikinya, sehingga partai-partai tersebut dapat dikelompokkan ke dalam berbagai tipe, kelompok, atau model tertentu. Berdasarkan tingkat komitmen partai

²⁰ *Loc.Cit*, Lutfi, M & Satriawan, M.I. Hlm. 38-39.

terhadap ideologi dan kepentingan, partai politik dapat diklasifikasikan dalam lima jenis, yaitu²¹:

- 1) Partai Proto adalah partai yang masih belum beranjak pada tahapan modern dimana partai masih dalam tahapan pembentukan.
- 2) Partai Kader merupakan partai lanjutan dari porto dimana, ideology partai sudah berjalan dan melakukan rekrutmen politik kepada partisipan menjadi kader partai.
- 3) Partai Masa merupakan partai dengan kader golongan kelas kebawah. Berbeda dengan partai porto dan kader yang merupakan partai kalangan menengah keatas.
- 4) Partai dictatorial merupakan partai yang cenderung dengan ideology yang kaku dan radikal.
- 5) Partai catth all merupakan gabungan partai kader dan partai masa. Artinya menampung kelompok sosial sebanyaknya, tujuannya untuk memenangkan pemilu.

1.5.2 Manajemen Partai Politik

Manajemen partai politik adalah proses pengelolaan seluruh aspek operasional dan strategis dari sebuah partai politik untuk mencapai tujuan politiknya. Ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan aktivitas-aktivitas partai untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai misi dan visinya.

²¹ *Loc.Cit*, Lutfi, M & Satriawan, M.I. Hlm. 41

Manajemen partai politik juga melibatkan pengembangan kebijakan internal, strategi komunikasi, pengelolaan sumber daya, dan pengembangan kader partai²².

Tujuan utama dari manajemen partai politik adalah untuk memastikan bahwa partai tetap relevan, responsif terhadap kebutuhan konstituennya, dan memiliki kapasitas untuk memenangkan pemilu serta mengimplementasikan agenda politiknya²³. Dengan manajemen partai politik maka sebuah partai politik akan terlembaga dengan baik, partai politik dapat menunjukkan bahwa mereka adalah entitas yang dapat dipercaya dan diandalkan dalam menjalankan fungsi-fungsi demokratis. Ini tidak hanya membantu mengatasi masalah penurunan kepercayaan publik tetapi juga memperkuat legitimasi dan stabilitas politik secara keseluruhan. Oleh karena itu, pelembagaan partai politik bukan hanya penting, tetapi esensial dalam menciptakan sistem politik yang sehat dan berkelanjutan²⁴.

Manajemen partai politik oleh Hofmeister dan Grabow memberikan landasan yang kuat untuk memahami bagaimana sebuah partai politik dapat diorganisir dan dikelola secara efektif dalam konteks demokrasi modern. Mereka mengidentifikasi sepuluh indikator utama yang masing-masing mempengaruhi kinerja dan keberhasilan sebuah partai politik. Pertama, keanggotaan dan organisasi menjadi dasar yang

²² Hofmeister, W., & Grabow, K. *Political Parties: Functions and Organisation in Democratic Societies*. Singapore: Konrad Adenauer Stiftung, 2011. Hlm. 28.

²³ *Ibid*, Hlm. 34.

²⁴ Randall, Vicky dan Lars, Svasand. (2002). Dalam Suryana, N, dkk, *Pelembagaan Partai Politik: Studi Pada Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandung Tahun 2019*. Jurnal Civic Hukum, Vol.5, 2020. Hlm.53.

penting dalam membangun struktur yang kuat dan terorganisir di dalam partai. Para anggota partai, baik dalam hal kualitas maupun keterlibatan mereka dalam kegiatan partai, menjadi penentu vital dalam kesuksesan partai.

Strategi rekrutmen anggota baru yang efektif dan program pendidikan serta pelatihan yang berkelanjutan untuk mengembangkan kualitas anggota adalah faktor-faktor penting lainnya. Menurut Huntington, pelebagaan dengan manajemen partai politik adalah proses dimana organisasi dengan mana tata cara (*prosedur*) memperoleh nilai baku dan stabil. Atau dalam pengertian Randall dan Lars, pelebagaan diartikan sebagai proses dimana partai menjadi stabil (mantap) dalam hal pola perilaku yang terintegrasi maupun dalam hal sikap (*attitude*) dan budaya²⁵.

Teori pelebagaan politik juga berfokus pada bagaimana manajemen partai politik, institusi politik, termasuk partai politik, berkembang, berfungsi, dan beradaptasi dalam lingkungan politik. Pelebagaan politik adalah proses di mana partai politik menjadi entitas yang stabil, terstruktur, dan dihormati dalam sistem politik. Ini mencakup cara-cara partai politik berinteraksi dengan masyarakat, anggota partai, dan sistem politik yang lebih luas²⁶.

²⁵ Samuel P. Huntington, *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Masa*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003. Hlm. 18.

²⁶ *Ibid.* Randall, Vicky dan Lars, Svasand. (2002). Dalam Suryana, N, dkk

Hofmeister dan Grabow memberikan beberapa indikator untuk membentuk manajemen partai politik modern yang dapat dijelaskan sebagai berikut²⁷:

1) Keanggotaan dan Organisasi

Struktur dan jumlah keanggotaan serta cara partai mengelola dan mengorganisir anggotanya.. Jumlah anggota aktif, sistem pengelolaan keanggotaan, keterlibatan anggota dalam kegiatan partai. Kualitas dan keterlibatan anggota partai dalam aktivitas dan pengambilan keputusan partai. Tingkat partisipasi anggota dalam rapat, komite, dan kegiatan partai. Indikator ini mencakup struktur organisasi partai dan cara partai mengelola keanggotaan.

Aspek-aspek penting yang diperhatikan meliputi jumlah anggota aktif, sistem pengelolaan keanggotaan, serta keterlibatan anggota dalam kegiatan partai. Evaluasi meliputi kualitas dan keterlibatan anggota dalam aktivitas sehari-hari dan proses pengambilan keputusan, seperti tingkat partisipasi anggota dalam rapat, komite, dan berbagai kegiatan partai. Ini juga melibatkan penilaian terhadap efektivitas struktur organisasi dalam mendukung tujuan partai serta kepuasan anggota terhadap proses administrasi dan pengelolaan keanggotaan.

²⁷ *Loc.Cit*, Hofmeister, W., & Grabow. Hlm. 48.

2) Rekrutmen Anggota Baru

Proses dan strategi yang digunakan partai untuk menarik anggota baru. Jumlah anggota baru yang direkrut setiap tahun, efektivitas kampanye rekrutmen. Indikator ini berkaitan dengan proses dan strategi yang diterapkan oleh partai untuk menarik anggota baru. Ini meliputi jumlah anggota baru yang berhasil direkrut setiap tahun, serta efektivitas berbagai kampanye dan inisiatif rekrutmen.

Analisis juga mencakup metode yang digunakan untuk menarik anggota baru, seperti kampanye media, kegiatan sosial, atau program promosi, dan evaluasi terhadap bagaimana strategi-strategi ini memengaruhi jumlah dan kualitas anggota baru yang bergabung.

3) Pendidikan dan Pelatihan Anggota Partai

Program yang disediakan oleh partai untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggotanya. Jumlah program pelatihan yang diadakan, tingkat partisipasi dan kepuasan anggota terhadap pelatihan. Program Partai Politik Kebijakan dan program yang ditawarkan partai kepada publik. Kesesuaian program dengan kebutuhan konstituen, keberhasilan implementasi program. Program pendidikan dan pelatihan yang disediakan oleh partai untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggotanya termasuk dalam indikator ini.

Penilaian dilakukan terhadap jumlah dan jenis program pelatihan yang diadakan, serta tingkat partisipasi anggota dan kepuasan mereka terhadap pelatihan yang diberikan. Ini juga mencakup analisis tentang bagaimana program-program ini membantu anggota dalam memahami kebijakan partai, mengembangkan keterampilan kepemimpinan, dan mempersiapkan mereka untuk peran-peran penting dalam partai dan masyarakat.

4) Komunikasi Internal dan Eksternal

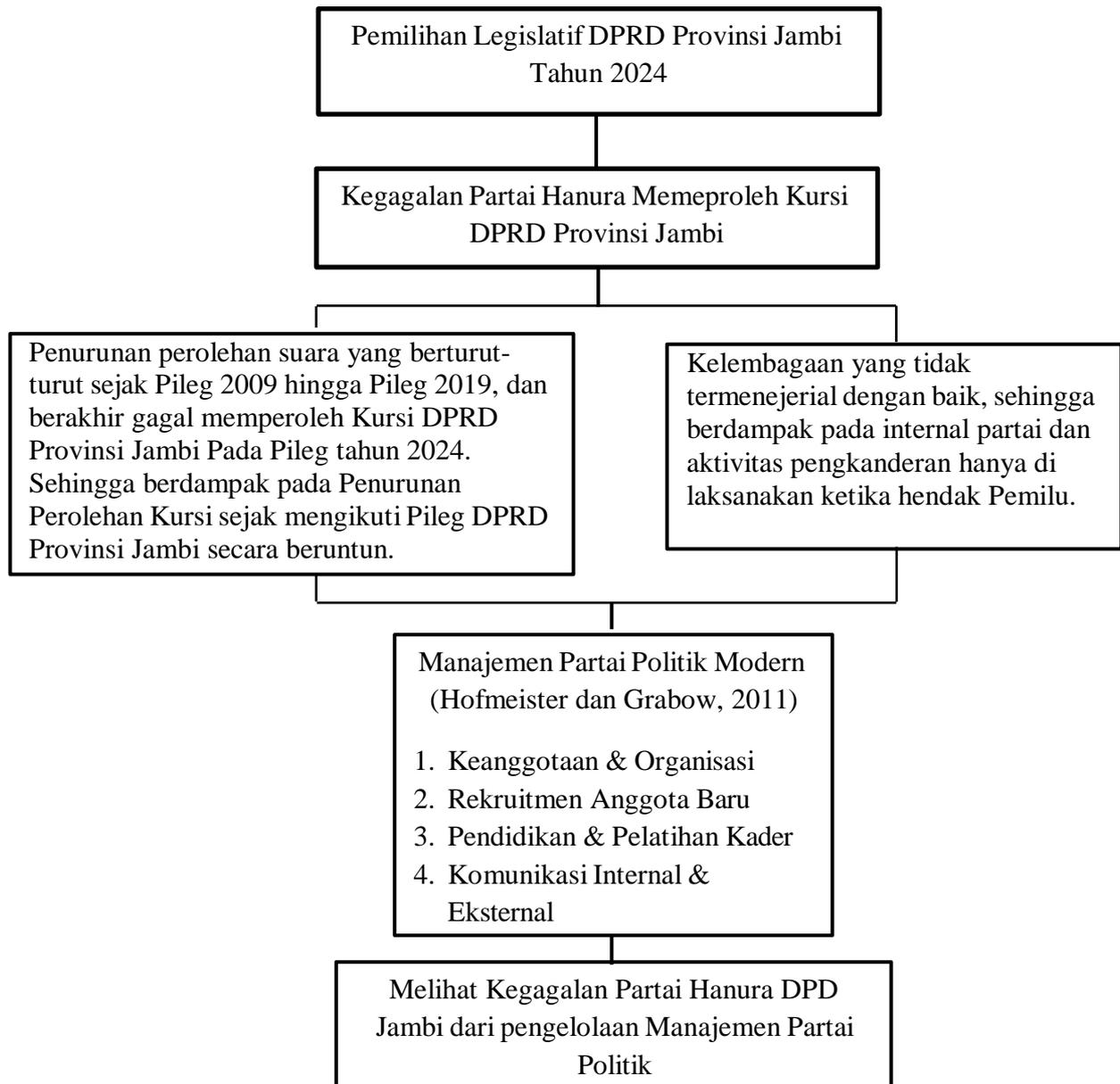
Cara partai berkomunikasi dengan anggotanya (internal) dan dengan publik serta pemangku kepentingan lainnya (eksternal). Efektivitas saluran komunikasi, frekuensi dan kualitas komunikasi, keterbukaan informasi. Indikator ini mengukur cara partai berkomunikasi baik dengan anggotanya (internal) maupun dengan publik serta pemangku kepentingan lainnya (eksternal).

Evaluasi dilakukan terhadap efektivitas saluran komunikasi yang digunakan, frekuensi dan kualitas komunikasi yang dilakukan, serta keterbukaan informasi dalam interaksi internal dan eksternal. Ini mencakup analisis mengenai bagaimana informasi disampaikan kepada anggota dan masyarakat, respons terhadap umpan balik, serta cara partai menangani isu-isu komunikasi yang muncul dalam hubungan dengan konstituen dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dengan menggunakan indikator ini, partai politik dapat mengevaluasi dan meningkatkan manajemen internal mereka secara komprehensif. Setiap indikator memberikan wawasan spesifik yang memungkinkan partai untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam operasional mereka. Misalnya, jika rekrutmen anggota baru rendah, partai dapat mengkaji ulang strategi pemasaran dan pendekatan rekrutmen mereka. Jika komunikasi internal tidak efektif, partai dapat mengembangkan saluran komunikasi baru atau memperbaiki yang sudah ada.

Dalam konteks Partai Hanura di Provinsi Jambi, penggunaan indikator-indikator ini dapat membantu partai untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan penurunan dukungan dan merumuskan strategi perbaikan. Dengan meningkatkan keanggotaan dan organisasi, mengoptimalkan rekrutmen anggota baru, menyediakan pendidikan dan pelatihan yang relevan, dan memastikan komunikasi yang efektif, Partai Hanura dapat membangun kembali kekuatannya dan meningkatkan daya saing dalam Pemilu mendatang.

1.6 Kerangka Pikir



Penelitian ini berfokus pada analisis kegagalan Partai Hanura dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD Provinsi Jambi tahun 2024. Terlepas dari partisipasi beruntun dalam Pileg, Partai Hanura mengalami penurunan perolehan kursi dan suara sejak Pileg 2009 hingga 2019, yang akhirnya menyebabkan kegagalan memperoleh kursi di Pileg tahun 2024. Fenomena ini dianalisis menggunakan teori Manajemen Partai Politik Modern yang

dikemukakan oleh Hofmeister dan Grabow (2011), yang mencakup indikator-indikator seperti keanggotaan dan organisasi, rekrutmen anggota baru, pendidikan dan pelatihan kader, serta komunikasi internal dan eksternal. Dengan menganalisis kegagalan ini melalui kerangka manajemen partai politik modern, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam pengelolaan Partai Hanura di DPD Jambi dan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing partai di masa depan.

1.7 Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis²⁸. Dalam metodologi penelitian terdapat beberapa aspek di antaranya sebagai berikut:

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017, Hlm. 78.

penelitian dengan cara deskripsi²⁹. Penelitian kualitatif cocok untuk menganalisis fenomena kegagalan Partai Hanura dalam Pileg DPRD Provinsi Jambi tahun 2024.

Karena memungkinkan pemahaman mendalam tentang berbagai faktor kompleks yang mempengaruhi hasil tersebut. Melalui wawancara dan analisis mendalam, penelitian kualitatif dapat menggali wawasan tentang manajemen internal partai, dinamika sosial dan politik lokal, serta persepsi pemilih. Pendekatan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai penyebab kegagalan dari internal Hanura Jambi secara langsung.

1.7.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis kegagalan Partai Hanura dalam Pileg DPRD Provinsi Jambi tahun 2024, dianalisis menggunakan teori Manajemen Partai Politik Modern yang dikemukakan oleh Hofmeister dan Grabow. Dengan menganalisis kegagalan ini melalui kerangka manajemen partai politik modern, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam pengelolaan Partai Hanura di DPD Jambi.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan penulis pada lokasi penelitian di Kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Jambi. Yang beralamat di Jl. Kapitan Pattimura (depan LP), Lorong Sekuntum, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Jambi.

²⁹ Le xy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006. Hlm. 90.

Penelitian ke lokasi penelitian ini guna penulis memperoleh data primer dan skunder dalam memenuhi data dalam penelitian ini.

1.7.4 Sumber Data

Dalam upaya memenuhi data dan informasi pada penelitian ini, penulis memperoleh dalam dua pemenuhan sumber data utama. Yakni sebagai berikut :

a) Data Skunder

Data skunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui referensi cacatan terdahulu, atau informasi yang lebih dahulu telah ada, selagi masih memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang diteliti³⁰. Seperti dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data skunder diantaranya penelitian terdahulu, buku, media berita online dan informasi terkait dokumen KPU serta data Partai Hanura.

b) Data Primer

Data primer merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian dengan melalui sumber pertama (responden atau informan, melalui wawancara) atau melakukan pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti³¹. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dan memperoleh data berbentuk dokumen dan dokumentasi yang dapat di

³⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, Hlm. 209.

³¹ *Loc.Cit*, Sugiyono, Hlm. 101.

pergunakan dalam melengkapi penelitian ini, dengan para informan kunci yang akan penulis cantungkan pada daftar informan.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *purposive sampling*. Pada penelitian ini penentuan informan dipilih secara *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Informan yang peneliti butuhkan terkait objek penelitian ini yang meliputi³² :

Tabel. 1.5
Daftar Informan

No	Informan	Pertimbangan Pemilihan Informan
1	Wakil Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Jambi	Sebagai wakil ketua jelas Mengetahui secara internal seluk beluk perjalanan partai Hanura serta sejarah partai itu sendiri, dan semua persoalan yang ada di dalamnya.
2	Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Jambi	Mengetahui secara internal dalam manajemen partai Hanura dan pengambilan Keputusan.
3	Caleg DPRD Prov. Jambi Partai Hanura Dapil Kota Jambi	Mengetahui langsung dari caleg yang tidak terpilih mengenai kondisi di lapangan. Dan tantangan maju nyaleg dari Hanura.
4	Dr. Pahrudin, HM.M.A. Selaku Akademisi, Pengamat Politik Jambi	Mengetahui dinamika politik dan partai politik serta perilaku pemilih masyarakat Jambi dari sudut pandang pengamat.
5	Bappilu DPD Partai Hanura Provinsi Jambi	Memahami dan mengetahui mengenai kebijakan partai dalam bidang kaderisasi, organisasi dan keanggotaan. Serta ingin mengkonfirmasi apakah semua aspek ini telah berjalan dengan aturan partai

Sumber : Data Olahan Penulis

³² *Loc. Cit.*, Sugiyono, Hlm. 48.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik yang dilakukan sebagai berikut :

a) Wawancara

Wawancara adalah interaksi antara dua individu untuk berbagi informasi dan ide melalui sesi tanya jawab, dengan tujuan membangun pemahaman tentang suatu topik tertentu guna dapat melengkapi data dalam sebuah penelitian, riset atau pun catatan sebuah peristiwa. Terdapat beberapa jenis wawancara, yaitu terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur³³. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara mendalam terstruktur dengan informan yang telah ditentukan berdasarkan tabel. 4 di atas.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan³⁴. Pada penelitian ini penulis akan menyangginkan data hasil temuan wawancara dengan dokumen-dokumen penting lainnya, berupa penelitian terdahulu dan dokumen partai. Serta bukti dokumentasi penulis saat penelitian.

³³ *Loc.Cit*, Jonathan Sarwono. Hlm, 186

³⁴ *Loc.Cit*, Sugiyono, Hlm. 64.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Peneliti menerapkan teknik analisis data di lapangan menggunakan model Miles dan Huberman. Menurut Sugiyono dalam bukunya, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama pengumpulan data berlangsung dan setelahnya, dalam periode tertentu. Ada tiga tahapan dalam analisis data kualitatif³⁵:

- a) Reduksi Data. Reduksi data berarti memilih data atau informasi yang relevan dengan topik penelitian dari hasil pengumpulan data
- b) Penyajian Data. Penyajian data adalah proses menampilkan atau memaparkan data yang diperoleh
- c) Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah menganalisis data atau informasi untuk kemudian sampai pada kesimpulan penelitian.

1.7.8 Keabsahan Data

Keabsahan data atau triangulasi data adalah konsep penting dalam penelitian kualitatif untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Ada beberapa triangulasi untuk mengabskan sebuah data penelitian, diantaranya sebagai berikut³⁶ :

- a) Triangulasi Metode (*Method Triangulation*), Menggunakan lebih dari satu metode untuk mengumpulkan data, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

³⁵ *Loc. Cit.*, Sugiyono, Hlm. 83.

³⁶ Husaini Usman, Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, Hlm. 88.

- b) Triangulasi Sumber (*Data Source Triangulation*), Mengumpulkan data dari berbagai sumber atau orang yang berbeda untuk mendapatkan perspektif yang lebih lengkap.
- c) Triangulasi Peneliti (*Investigator Triangulation*), Melibatkan lebih dari satu peneliti dalam proses pengumpulan dan analisis data untuk mengurangi bias pribadi.
- d) Triangulasi Teori (*Theory Triangulation*), Menggunakan berbagai perspektif teori untuk menafsirkan data dan temuan.

Dengan menggunakan triangulasi, peneliti dapat meningkatkan keakuratan dan kepercayaan hasil penelitian, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti.